Amankan Aset Negara, PLN, KPK dan BPN Rampungkan 13.877 Sertifikasi Tanah

Realisasi program sertifikat tanah aset PLN hingga Oktober ini mencapai 13.877 persil tanah dari target sebanyak 27 ribu persil tanah yang harus bersertifikat

Ambon: Detikperu.com- PT PLN (Persero) telah mengamankan aset negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebanyak 13.877 persil tanah sepanjang Januari-Oktober 2021. Targetnya, tahun ini ada 27 ribu persil tanah yang sah menjadi aset PLN. Kamis 4 November 2021

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PLN Sinthya Roesly menjelaskan dalam acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku, pada Kamis (04/11), dengan penambahan jumlah tanah yang bersertifikat hingga Oktober kemarin, maka total aset tanah yang dimiliki PLN sebesar 62.666 persil. Hingga akhir tahun ini, Sinthya mengatakan perseroan menargetkan aset tanah bisa bertambah menjadi 75.789 persil.

“Langkah ini tidak bisa tercapai secara signifikan tanpa adanya dukungan dari KPK dan BPN. PLN berharap kerjasama dan dukungan dari para stakeholder bisa membawa manfaat besar bagi sistem kelistrikan di Indonesia,” ujar Sinthya.

Ia merinci, capaian sebanyak 13.877 persil tanah tersebut terdiri dari beberapa sebaran sesuai regional. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan realisasinya sebanyak 7.801 sertifikat. Sedangkan wilayah Jawa Bali realisasinya sebesar 3.302 sertifikat. Dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai 2.774 sertifikat yang sudah selesai.

Khusus Maluku, lanjut Sinthya, hingga 2 November tahun ini PLN

kembali menerima sertifikat tambahan kurang lebih 128 sertifikat. Berdasarkan perolehan tersebut, sertifikasi aset PLN di provinsi Maluku sudah mencapai 93 persen dari seluruh aset yang dimiliki PLN.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BPN yang sudah membantu PLN dengan luar biasa, bahkan bagi aset-aset yang masih dalam proses pembebasan, BPN turut mendampingi dalam tahap pengukuran sehingga meningkatkan ketepatan dan mempercepat proses sertifikasi kemudian,” ujar Sinthya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai kerjasama untuk mengamankan aset negara ini merupakan langkah strategis. Keterlibatan KPK dalam kerjasama ini agar segala proses urusan penataan aset bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Presiden meminta untuk mempercepat proses sertifikat tanah ini. Presiden mewanti wanti agar segala proses bisa sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Kami pastikan apa yang kita lakukan bersama ini bisa sesuai arahan Presiden dan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Gufon.

Gubernur Maluku Murad Ismail juga siap mendukung PLN dalam menuntaskan penataan aset tanah di Maluku. Ia menilai langkah bersama ini bisa memberikan nyala listrik 100 persen di seluruh pelosok Indonesia.

“Kami tentu saja mendukung penuh agar pembangunan infrastruktur listrik bisa merata di seluruh Indonesia,” ujar Murad.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Korsup Wilayah I KPK-RI, Didik Agung Widjanarko, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Forkopimda Provinsi Maluku dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. (Humas)